

PRESS RELEASE

Putusan MK: Perkara PHP Kabupaten Bandung Barat Tidak Berlanjut

Proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2024 resmi memasuki tahapan pengucapan putusan atau ketetapan sela (dismissal) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dari total 310 perkara sengketa Pilkada yang diregistrasi MK, perkara Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan tidak berlanjut ke tahap pembuktian.

Sidang pembacaan putusan untuk Kabupaten Bandung Barat digelar pada Rabu (5/2/2025) pukul 19.30 WIB dan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Berdasarkan salinan putusan Nomor 202/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025, MK mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terkait kedudukan hukum Pemohon, serta menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagai pemberi keterangan dalam perkara tersebut tidak melanjutkan ke sidang pembuktian. Dari seluruh perkara yang diregistrasi MK, hanya 40 perkara PHP Kada yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap persidangan pembuktian. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025, perkara lanjutan akan diputus pada 24 Februari 2025.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menghadiri sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (17/1/2025) dengan agenda mendengarkan jawaban KPU sebagai Termohon, keterangan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan, serta jawaban dari Pihak Terkait. Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul dan Anggota Ahmad Zaenudin hadir langsung memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim.

“Keterangan yang kami sampaikan merupakan hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan. Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan,” ujar Riza Nasrul.

Sebelum sidang, Bawaslu KBB juga telah menyerahkan berkas keterangan perkara Nomor Register 192/PHPU.BUP/XXIII/2025 ke MK pada Kamis (16/1/2025) sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas lembaga.

“Berkas yang kami serahkan merupakan bukti kerja pengawasan yang dilakukan secara profesional dan terbuka,” tambah Anggota Bawaslu KBB Siska Ayu Anggraeni.

Bawaslu KBB menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan keterangan secara objektif dalam setiap proses sengketa hasil pemilihan.

“Kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan terus memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai prinsip keadilan dan integritas,” tutup Riza Nasrul.

Narasumber:

Riza Nasrul Falah Sopandi

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Bandung Barat, 5 Februari 2025

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat